

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi LPP TVRI

TVRI mulai berdiri sejak 24 Agustus 1962 yang dikenali dengan siaran pertama Asian Games IV di Stadion Utama GBK, Kebun Kelapa, Petunduan dan Bendungan Hilir serta jalan baru yaitu Jalan M.H Thamrin, Jembatan Semanggi, Gatot Subroto, hingga TVRI sebagai stasiun penyiaran turnamen. Persiapan menyambut stasiun televisi pertama di Indonesia ini memakan waktu hampir 10 bulan.

Memasuki tahun 1963 status masih berbentuk Yayasan Televisi Republik Indonesia dan disahkan melalui keputusan Presiden No. 215 Tahun 1963 terkait Pembentukan Yayasan Televisi Republik Indonesia. Stasiun televisi pertama di Indonesia ini telah memiliki jangkauan yang cukup luas ke seluruh pelosok. Disusul dengan era reformasi yang sejalan pembubaran Departemen membuat status TVRI berganti menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada tahun 1971 melalui Keppres No.355/M/1999. Walaupun hukum TVRI yang tidak terkelola dengan baik pada saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Kepmen No.101/KEP/m.psm/1/2000 mangamanatkan petinggi dan staf di Direktorat Televisi serta UPT di Jakarta dan daerah agar menjalankan kewajiban serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2000, status berganti kembali yaitu Perusahaan Jawatan (PERJAN) mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 yang berisi Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Tanggal 7 Juni Tahun 2000. Akhirnya terdapat kepastian status hukum yaitu perusahaan jawatan PERJAN yang menjalankan aktivitas siaran tv berdasarkan prinsip yang berlaku di lingkup televisi publik, netral, independent, mandiri serta memiliki acara berita yang mengarah pada kebutuhan publik untuk tidak mengambil profit. Melaksanakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan, dan hiburan serta lainnya yang telah memenuhi ketetapan. Pada bulan September 2001, terbit PP No. 64 Tahun 2001 mengenai Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan kepada Badan

Usaha Milik Negara. Terbitnya PP ini membuat Pembinaan Perjan TVRI dialihkan dari Departemen Keuangan kepada Menteri Negara BUMN.

Status TVRI berganti di tahun 2002 yaitu Perseroan Terbatas (PT) TVRI di bawah pengendalian Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN setelah dikeluarkan PP Nomor 9 Tahun 2002 mengenai Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 17 April 2002. TVRI diharapkan dapat mengadakan aktivitas penyiaran tv berdasarkan prinsip televisi publik yang netral, mandiri dan independen demi menumbuhkan dan membangkitkan perilaku kesehatan masyarakat, mengasah kemampuan dan kepandaian, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan menggelar usaha di sektor televisi yang mewujudkan acara siaran yang bermutu tinggi dan sehat.

Pada tahun 2005, status TVRI bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP Televisi Republik Indonesia. LPP TVRI bertugas dalam menyajikan berita yang edukatif, menghibur, dan melestarikan budaya untuk kepentingan bersama. Status LPP ini masih berlaku hingga saat ini bagi TVRI. Awal munculnya stasiun ini diartikan yaitu era kejayaan sebab dianggap salah satu media penyiaran tv pemerintah yang berkoordinasi di Indonesia. Di bawah kebijakan penyiaran monoplastik, TVRI mengemas berita melalui konsep "sesuai arahan Presiden." Pemanfaatan teknologi melalui analog hibah luar negeri, para staf berhasil menampilkan acara non-berita secara baik. Berlimpahnya budaya, diversitas etnis dan sosial menjadi acuan inspiratif di lingkungan TVRI. Hal ini yang menjadi landasan kesuksesan program di TVRI. Upaya TVRI cukup diminati oleh pemirsa karena mencerminkan moral yang membangun bangsa atau bisa disebut "*nation and character building*".

Selama beberapa decade, TVRI telah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat. Karena kehadirannya menjadi wadah ekspresi bagi talenta local untuk bersinar dan berkarya. Sebagai lembaga yang independen, muncul komitmen untuk dapat objektif dalam menyajikan berita, agar dapat menjadi sumber kepercayaan bagi masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang kredibel. Melalui upaya berkelanjutan, stasiun ini berharap untuk dapat menjadi pilar utama dalam memajukan dunia penyiaran Indonesia dan membawa

manfaat nyata bagi khalayak serta kebanggaan bangsa yang kemudian bisa melambung di kancah internasional.

2.1.1. Visi dan Misi LPP TVRI

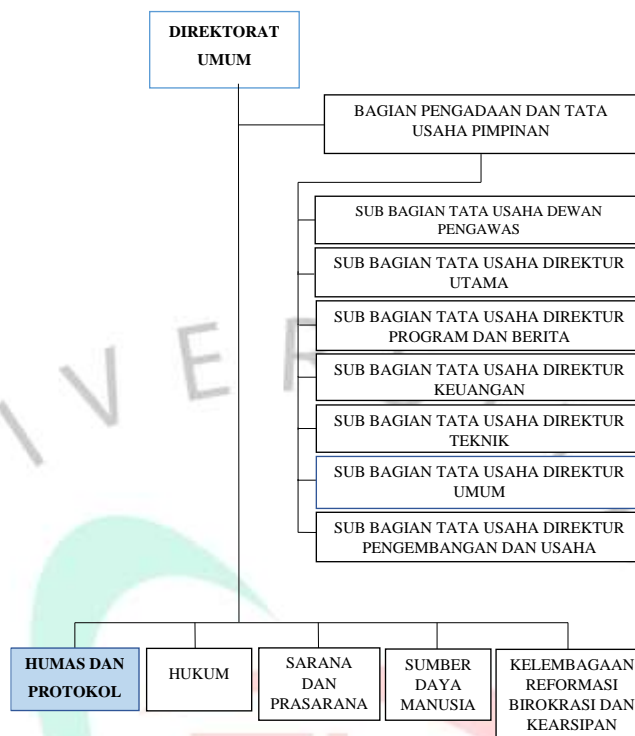
1. Visi:

Visi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.

2. Misi:

- a. Menyelenggara program siaran yang terpercaya, memotivasi, dan memberdayakan yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
- b. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.
- c. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global.
- d. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.
- e. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Struktur Organisasi Direktorat Umum LPP TVRI



Tabel 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Umum LPP TVRI
Sumber: Humas dan Protokol LPP TVRI

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jabatan yang ada di LPP TVRI:

1. Direktorat Umum

Direktorat Umum memiliki tugas, yaitu melaksanakan kebijakan umum suatu lembaga di bidang sumber daya manusia, hubungan masyarakat, dukungan administrasi pimpinan, hukum, kelembagaan, serta pengaturan peralatan rumah tangga dan negara.

2. Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan

Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai kewajiban menjalankan penyediaan barang/jasa pemerintah dan fasilitas dukungan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

a. Sub Bagian Tata Usaha Dewan Pengawas

Sub Bagian Tata Usaha Dewan Pengawas memiliki tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Dewan Pengawas.

b. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Utama

Sub Bagian Tata Usaha Direktur Utama memiliki tanggung jawab menjalani urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Dirut.

c. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Program dan Berita

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Program dan Berita mempunyai tanggung jawab melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat Program dan Berita.

d. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Keuangan memiliki kewajiban menjalankan kepentingan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat Keuangan.

e. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Teknik

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Teknik mempunyai kewajiban melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat Teknik.

f. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Umum

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Umum memiliki tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat Umum.

g. Sub Bagian Tata Usaha Direktur Pengembangan dan Usaha

Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan dan Usaha memiliki tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketataklasaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan Direktorat Pengembangan dan Usaha.

3. Humas dan Protokol

Humas dan Protokol memiliki tugas sebagai garda terdepan yang menjembatani LPP TVRI untuk berkomunikasi dua arah dengan publik atau pihak eksternal dan internal dengan karyawan LPP TVRI. Memiliki peran dalam mengatasi masalah, menemukan fakta-fakta, dan memberikan aksi yang nyata dalam mengedepankan visi dan misi perusahaan.

Praktikan bertugas pada divisi humas dan protokol di bawah pengawasan Priska Novita Marintan sebagai pembimbing lapangan. Memiliki 2 (dua) kepala pimpinan, yaitu Ibu Chaerini Rusjdi yang memiliki jabatan fungsional sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Bapak Teuku Fahmi selaku Ketua Tim Protokol Humas. Selama menjalani kerja profesi, praktikan melakukan pekerjaan dengan pelaporan, penyampaian keluhan, dan mendapatkan evaluasi dari pembimbing kerja lapangan. Praktikan mendapatkan pembimbingan kerja yang menjadi poin penting dalam membantu mengoptimalkan keterampilan di kantor. Dimana para mentor membantu dalam memahami tugas dan tanggung jawab. Memberikan arahan dan nasihat mengenai langkah-langkah untuk mencapai tujuan pekerjaan. Posisi praktikan dalam bagian humas dan protokol yang paling utama adalah menjadi anggota humas dan protokol serta petugas pelayanan publik di meja PPID. Praktikan bertugas melayani tamu yang datang untuk meminta informasi publik seperti data arsip, melakukan survei ataupun mendaftar praktik kerja lapangan. Praktikan juga menjadi Person in Charge (PIC) atau Narahubung dengan para tamu. Praktikan juga bertugas menjadi *tour leader* dalam acara kunjungan di LPP TVRI, menjadi *master of ceremony*, mengumpulkan data-data untuk menulis artikel, mewawancarai, menulis transkrip dan menyusun artikel kehumasan, menjadi *liaison officer* atau menjadi penghubung antara tamu delegasi dengan panitia penyelenggara, mengikuti rapat evaluasi peningkatan pelayanan publik pada sub bagian PPID, membuat desain *banner* dalam memperingati hari besar yang ada, serta rutin mengikuti apel mingguan sebagai petugas Pedoman Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

4. **Hukum**

Sub koordinator hukum adalah yang mengatur UU, kebijakan dan pembatasan dalam menjalankan kepentingan pemerintahan di bidang penyiaran publik. Adapun jenis produk hukum yang ada di lingkungan LPP TVRI, antara lain peraturan Dewan Direksi, keputusan, surat edaran, instruksi, dan surat perintah.

5. **Sarana dan Prasarana**

Bertugas dalam pengaruh langsung terhadap fungsional dalam cakupan tempat kerja, peralatan pendukung, akomodasi dan kunci utama saat

melaksanakan fungsi teknis. Melalui ini, dapat mendukung produktivitas dan efisiensi kerja seperti pemeliharaan bangunan dan ruang yang nyaman. Kemudian infrastruktur teknologi termasuk komputer, server, jaringan, printer, scanner, dan perangkat keras yang dibutuhkan lainnya.

6. Sumber Daya Manusia

Sub Koordinator SDM mempunyai tugas sebagai pelaksana fungsi pelayanan fungsional kegiatan penyiapan penyusunan laporan, rencana, program dan anggaran serta pengelolaan sumber daya manusia Reformasi Birokrasi, Hukum, Humas dan Protokol.

7. Kelembagaan Reformasi Birokrasi dan Kearsipan

Sub Koordinator umum, Reformasi Birokrasi dan Kearsipan memiliki kewajiban dalam servis manfaat sinkronisasi, mengatur rancangan, pengaktualan, penanganan, pengamatan, serta penilaian dan peliputan kegiatan umum Sumber Daya Manusia, Reformasi dan Birokrasi, Kearsipan, Hukum, serta Humas dan Protokol LPP TVRI.

2.3 Kegiatan Umum Instansi

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Menurut Peraturan Dewan Direksi No. 76/PRTR/DIREKSI/TVRI/2012 pada 31 Juli Tahun 2012 berisi Pedoman PPID di Lingkungan LPP TVRI, PPID memiliki tugas beserta fungsi sebagai berikut.

a. Tugas PPID LPP TVRI:

Merancang dan menyatukan, melakukan, mengamati, dan menilai penerapan aktivitas pengurusan dan servis informasi di lingkup LPP Televisi Republik Indonesia.

b. Fungsi PPID LPP TVRI:

- 1) Mengumpulkan informasi publik dari seluruh satuan kerja di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- 2) Pengaturan dan pencadangan keterangan yang didapat oleh semua satuan kerja di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- 3) Pemilihan dan pemeriksaan keterangan publik yang tergolong kategori dikecualikan oleh informasi yang tidak tertutup untuk publik.
- 4) Menuntaskan sengketa servis informasi.

2. Protokol

Memiliki definisi sebagai bagian yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik dalam kedinasan, kantor, maupun masyarakat. Petugas pelayanan informasi bagian PPID diwajibkan untuk memperhatikan dan menerapkan beberapa regulasi terkait pelayanan, antara lain:

- a. Menerapkan 5S dalam menyambut tamu yang datang.
- b. Melayani tamu sepenuh hati dengan mempersilahkan duduk dan mengisi buku tamu sebagai tahap registrasi.
- c. Menanyakan maksud dan tujuan tamu datang ke LPP TVRI.
- d. Memberikan air mineral dan permen dalam tahap awal pengenalan agar tamu lebih nyaman. Jika keperluan tamu menyangkut Dewan, Direktorat, manajer, maupun pejabat, maka petugas PPID akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak resepsionis terkait perizinan dan ketersediaan waktu dari yang bersangkutan.
- e. Jika keperluan tamu adalah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kunjungan maupun riset maka tamu wajib untuk melengkapi formulir yang telah disiapkan. Form tersebut akan diajukan kepada pihak Humas untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
- f. Menyampaikan ucapan terima kasih dan kalimat kepedulian kepada tamu yang akan melakukan perjalanan kembali

3. Rapat Koordinasi

Rapat mengenai kegiatan penting di LPP TVRI seperti reformasi birokrasi dan sistem kerja baru di lingkungan LPP TVRI, implementasi reformasi birokrasi terkait pengadaan barang/jasa, sistem pemerintahan berbasis elektronik, agenda siaran, rapat koordinasi Pemilu, inisiasi perwujudan SDM yang Berakhlak, persiapan tim siaran KTT G-20 Bali dan lain-lain.

4. Konsinyering

Dalam hal ini biasanya berisi kegiatan seperti penyusunan RKA-K/L, perumusan strategi komunikasi dalam menunjang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, peninjauan kembali terkait regulasi yang mengacu pada PPID dan lain-lain. Konsinyering biasanya menghabiskan waktu yaitu beberapa hari kerja demi menyusun strategi dalam peningkatan kualitas terkait permasalahan yang ingin dibenahkan.

5. Kunjungan

Aktivitas ini biasanya dihadiri oleh adik-adik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mahasiswa/i, organisasi, komunitas, dan anggota masyarakat lainnya dengan tujuan melakukan *tour* agar lebih mengenal LPP TVRI dan menambah wawasan terkait gambaran dunia kerja yang sesungguhnya. Biasanya para tamu tersebut ingin melihat proses siaran televisi secara langsung. Menurut kebanyakan tamu merasa bahwa mereka mendapatkan *experience* baru sekaligus belajar teknik-teknik siaran, *controlling* dan *editing*. Para tamu akan diajak berkeliling untuk melihat studio-studio yang ada di antaranya studio 5, *sub control*, *master control*, *production control*, auditorium, studio 4 *newsroom*, dan studio 2 Pusdiklat.

Ada pula kegiatan kunjungan untuk mengunjungi Satuan Transmisi TVRI di luar daerah dalam rangka evaluasi maupun kunjungan wajib. Serta kegiatan kunjungan kerja sama dengan tim kelembagaan lain seperti halnya mengenai produksi dan penyiaran program acara demi menunjang kredibilitas.

6. **Sosialisasi**

Sosialisasi meliputi kegiatan untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman terkait Reformasi Birokrasi dan Sistem Kerja Baru di lingkungan LPP TVRI, salah satunya dengan dilakukannya sosialisasi yang merata kepada seluruh karyawan baik di TVRI Kantor Pusat maupun TVRI Stasiun Daerah. Dirut LPP TVRI berharap melalui kegiatan sosialisasi dapat menciptakan konsistensi yang tinggi dari jajaran pimpinan dan seluruh pegawai untuk menerapkan reformasi birokrasi di lingkungan LPP TVRI.

7. **Evaluasi**

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan LPP TVRI. Seperti kegiatan evaluasi pelayanan publik LPP TVRI oleh Kemenpan RB dilakukan oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Indra Setiawan dan Analis Kebijakan Pertama, Sinta Nur Fitriani selaku Evaluator. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 2 September 2022 yang dilakukan di ruang rapat Lantai 3 GPO LPP TVRI. Serta Penerapan Penilaian Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di TVRI Pusat dan

TVRI Stasiun Daerah Tahun 2022 dilaksanakan di Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan pada tanggal 29 s.d. 31 Agustus 2022.

8. Bakti Sosial

Bentuk kepedulian terhadap sesama umat manusia yang melatarbelakangi diciptakannya kegiatan bakti sosial ini. Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno menyampaikan bahwa demi upaya merawat negeri, maka harus didukung dengan memiliki pegawai-pegawai yang tangguh. Acara bakti sosial ini sangat penting sebagai wadah untuk mendeteksi kesehatan para karyawan dalam meminimalisir risiko penyakit menular di lingkungan LPP TVRI. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter-dokter profesional dan bersifat gratis, sehingga mengundang antusias yang sangat baik dari para pegawai. Bakti sosial ini turut dihadiri oleh Lembaga Kedokteran Gigi TNI, Direktur P2PTM RI Elvieda Sariwati, Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Arif Rahman, Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, serta Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti. Acara bakti Sosial ini, para pegawai dapat memeriksa kesehatan sepenuhnya mulai dari gigi dan badan serta dapat melakukan donor darah.

9. Upacara

Apel pagi dilaksanakan secara rutin setiap hari Senin, secara umum merupakan bentuk pengamalan dari kepatuhan dan penghormatan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945. Maksud dari diadakan apel yaitu untuk mengelola dan menciptakan rasa bangga dan cinta tanah air. Secara lebih khusus, apel pagi merupakan salah satu forum untuk berbagi informasi tentang perkembangan ataupun keadaan yang terjadi di lingkungan kerja LPP TVRI. Kegiatan apel rutin dijalankan setiap jam 8 pagi di halaman Gedung Pusat Produksi Siaran (GPPS) LPP TVRI. Sebagai penciptaan kesatuan dan identitas upacara ini rutin digelar untuk membantu memunculkan kerukunan dan memperkuat hubungan karyawan. Serta digunakan sebagai forum untuk menyampaikan hal penting kepada seluruh staf. Dapat meliputi kebijakan baru, perubahan prosedur, pencapaian perusahaan, dan pengenalan anggota tim baru. Dari upacara, karyawan dapat merasa dihargai, diakui dan didorong untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan karena terdapat peningkatan moral dan motivasi. Meskipun tujuan berbeda, upacara rutin berupaya

untuk membangun budaya perusahaan yang positif, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, serta keterikatan karyawan terhadap perusahaan.

10. Meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018

Laporan keuangan yang sebelumnya menerima opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), lalu berkembang menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dan diberikan langsung oleh BPK pada laporan keuangan LPP TVRI tahun 2018. WTP adalah opini audit tertinggi yang diberikan langsung oleh BPK mengenai tata kelola anggaran di kementerian atau lembaga negara. Helmy Yahya menyampaikan jika pencapaian ini merupakan opini tertinggi dan perdana.

11. Meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan BMN Awards pada Tahun 2019

Pembenahan terkait laporan keuangan LPP TVRI dilakukan oleh Helmy Yahya yang menjabat sebagai Direktur Utama saat itu ternyata membuahkan hasil. Optimalisasi informasi keuangan di Era Digital dirasa sangat perlu dilakukan demi menumbuhkan sikap transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam mengelola keuangan negara. LPP TVRI akhirnya memperoleh predikat WTP dari BPK RI. Serta membawa penghargaan BMN Awards dari Kementerian Keuangan RI.

12. Meraih Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2020

Perolehan opini WTP merupakan kali ketiga bagi LPP TVRI dan diberikan langsung oleh Pimpinan BPK yang diwakili oleh Auditor Utama Keuangan Negara III Prof DR Bambang Pamungkas, MBA, AK, CSFA., CPA., CFRA. Penyerahan diberikan melalui daring yang dihadiri oleh kementerian serta lembaga lainnya pada Senin, 12 Juli 2021. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan bahwa pencapaian tersebut tidak luput dari hasil kinerja dan loyalitas seluruh leretan Direksi dan Staf LPP TVRI.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Pamungkas Trihadiatmoko menyebutkan perolehan penghargaan ini adalah bentuk nyata bahwa TVRI telah mengelola APBN secara profesional, akuntabel dan transparan.

13. Meraih Anugerah Meritokrasi 2021 Kategori Baik

Acara Gelar Anugerah Meritokrasi digelar di Surabaya pada 7 Desember 2021. Tujuan dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk memastikan bahwa ASN diisi secara benar oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas dan kompeten. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa acara Anugerah Meritokrasi merupakan bukti bahwa instansi pemerintah telah menjalankan amanat UU No 5 Tahun 2014 terkait ASN. Konsistensi juga pengawasan yang tinggi merupakan upaya keberhasilan dalam aspek ini. Dalam acara ini, LPP TVRI berhasil masuk ke dalam kategori instansi yang memiliki predikat baik dengan akumulasi nilai 255. Penghargaan diambil langsung oleh Dirum LPP TVRI Meggy Theresia Rares.

14. Juara Pertama Kategori Sertifikasi BMN Terbaik

Acara Anugerah Reksa Bandha yang digelar dalam memperingati Hari Kekayaan Negara ke-16 pada Rabu 23 November 2022 di Gedung Dhanapala Jakarta. Dalam acara ini, LPP TVRI berhasil memperoleh penghargaan sebagai juara I kategori sertifikasi BMN terbaik. Hal ini diapresiasi oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI dengan berterima kasih kepada lembaga yang mendapatkan penghargaan. Karena, melalui kinerja yang telah dikerahkan membuktikan bahwa aset atas nama negara telah dikelola dengan sangat baik, dimanfaatkan secara positif, diadministrasikan untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Acara ini juga membuktikan bahwa LPP TVRI berhasil mempertahankan penghargaan serupa yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.